



ANALISIS STRATEGI (*COMMUNITY BUILDING*) PEMERINTAH DESA KUPUK, KECAMATAN BUNGKAL, KABUPATEN PONOROGO DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KUPUK

Kurnia Rahmawati, Jusuf Harsono, Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email : kurniiarachma@gmail.com

Abstrak

Desa Kupuk memiliki potensi alam, sosial, budaya, dan adat istiadat serta karakteristik masyarakat yang khas. Masyarakat Desa Kupuk juga sangat antusias dan partisipatif dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk, inisiator dan penggerakannya yakni Kelompok Sadar Wisata “Menjemput Impian”. Pemerintah Desa Kupuk sangat mendukung program pengembangan Desa Wisata Kupuk. Namun, pengembangan Desa Wisata Kupuk masih belum maksimal sehingga promosi juga belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Padahal, Desa Kupuk telah berhasil mendapatkan Juara I Lomba Desa Tingkat Kabupaten Ponorogo dan juga Juara II Lomba Desa Tingkat Propinsi Jawa Timur. Penguatan pengembangan dalam sektor pariwisata menjadi hal yang urgent. Ada banyak sektor segi kehidupan yang secara otomatis akan turut terangkat. Jika sektor pariwisata maju dan berkembang, maka dari segi ekonomi perekonomian masyarakat juga akan meningkat. Sehingga dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji terkait strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Kupuk dalam pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat dan juga faktor-faktor yang mendukung serta menghambat dalam pengembangan tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Kupuk dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk sudah cukup baik, Pemerintah menggunakan strategi Community Building dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk, namun masih ada yang perlu di evaluasi. Dalam konsep good governance paling dasar, ada tiga elemen penting yang menjadi komponen utama dalam pembangunan, yakni pemerintah, masyarakat dan juga pihak swasta. Pemerintah Desa Kupuk tidak menerima investor dari luar (pihak swasta), jika demikian maka dapat kita ketahui bahwa salah satu komponen utama dalam pembangunan tidak dilibatkan yakni sektor swasta, padahal sektor swasta memiliki peranan yang penting dalam pembangunan. Percepatan pembangunan akan sulit dicapai jika tidak melibatkan sektor swasta.

Kata Kunci : *Strategi (Community Building), Pemerintah Desa, Pengembangan Desa Wisata.*

Abstract

Kupuk village has natural potential, social, culture, and customs with characteristic of society. The people of Kupuk Village are also very enthusiastic and participative in the development of the Kupuk Tourism Village, the initiator and the driver is the Tourism Conscious Group "Menjemput Impian". Kupuk Village Government strongly supports the development of Kupuk Tourism Village. However, the development of Tourism Village Kupuk still not maximal so that promotion can not be implemented usefully. In fact, Kupuk Village has managed to get the first winner of the Village Competition of Ponorogo District in 2016 and also got the second winner of Village Competition Level of East Java Province in 2016. Strengthening development in the tourism sector becomes urgent. There are many sectors of life that will automatically be lifted up. If the tourism sector developed and grow up, then in terms of economic economy of society will also increase. So in this skripsi thesis the authors want to examine the related strategies undertaken Kupuk Village Government in the development of Community Based Village Tourism and also the factors that support and inhibit the development. Researcher use descriptive qualitative, research method with technique of determination, and to got informant use purposive sampling whereas technique of collecting data used by method of triangulation. The result of the research shows that the strategy of Kupuk Village Government in the development of Kupuk Village is good enough, the Government uses the Community Building strategy in Kupuk Tourism Village development, but there is still a need to be evaluated. In the most basic concept of good governance, there are three important elements that become the main component in development; they are government, society and also private sector. Kupuk Village Government does not accept outside investors (private parties), so we can know that one of the main components in development is not involved is the private sector, whereas the private sector has an important role in development. Acceleration of development will be difficult to achieve if it does not involve the private sector.

Keywords: *Strategy (Community Building), Village Government, Village Tourism Development.*

PENDAHULUAN

Desa Kupuk memiliki beragam potensi alam, sosial, budaya maupun karakteristik masyarakat yang khas. Diantaranya potensi tersebut diantaranya sendang alam yang unik dan berkelok – kelok seperti ular. Sendang tersebut berada di lahan seluas 5 Ha². Desa Kupuk juga memiliki tradisi yang unik setiap tahunnya, yakni acara *Grebeg Selo*. Kegiatan tersebut terilhami dari acara rutin yang digelar tahunan oleh

Pemerintah Kabupaten Ponorogo yakni *Grebeg Suro*.

Desa Kupuk juga merupakan daerah sentra kecil Industri Genteng di Kabupaten Ponorogo. Selain itu Desa Kupuk juga memiliki potensi industri dan kerajinan, diantaranya terdapat pengrajin ukir jaranan thek, pengrajin anyaman bambu, sentra penyamaan kulit, serta sentra pembuatan wayang kulit.

Penguatan pengembangan dalam sektor pariwisata menjadi hal yang *urgent*. Ada banyak sektor segi kehidupan yang

secara otomatis akan turut terangkat. Jika sektor pariwisata maju dan berkembang, maka secara otomatis perekonomian masyarakat juga akan meningkat, dinamisasi politik juga akan lebih hidup, sosial kemasyarakatan juga akan menguat melalui kelompok-kelompok sosial yang ada, begitu pula budaya yang berkembang di masyarakat akan semakin terlestarikan. Selain itu kondisi sarana, prasarana maupun transportasi juga akan lebih baik demi mendukung pembangunan sektor pariwisata.

Salah satu aspek yang penting dalam pengembangan pariwisata adalah strategi yang dilakukan pemerintah desa, karena keberhasilan pembangunan kepariwisataan sangat bergantung pada kemampuan birokrasi di dalam mengelola sumber daya pariwisata. Menurut Kusworo dan Damanik (2002:106) menyatakan bahwa "...penyusunan strategi yang tepat, persoalan manajemen dan perencanaan kepariwisataan merupakan kebutuhan yang mendesak, karena sesungguhnya dari sinilah titik tolak perjalanan industri pariwisata tersebut."

Di era sekarang ini, tuntutan peningkatan kinerja sektor pariwisata sangat tinggi, hal ini berguna untuk memenuhi pencapaian target-target ekonometrik. Pembenahan terhadap sumber daya manusia dan juga birokrasi

masih belum begitu kuat disuarakan. Pembangunan dan pembenahan cenderung pada aspek kuantitatif yakni seberapa besar devisa, kesempatan kerja dan kunjungan wisatawan, dan sebagainya (Brohman dalam Kusworo dan Damanik, 2002:105-106). Aspek kualitatif cenderung diabaikan seperti perubahan positif mutu sumber daya manusia. Padahal tujuan yang mendasari tujuan pariwisata, seperti target-target ekonomi hanya akan dapat dicapai jika persoalan sumber daya manusia lebih dahulu tertangani. (Kusworo dan Damanik, 2002:106).

Salah satu langkah yang dapat diterapkan pemerintah dalam perbaikan birokrasi dan meningkatkan pembangunan desa/daerah melalui penerapan konsep *good governance* yang melibatkan tiga *stakeholder* yakni *state* (pemerintah atau negara), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Begitupula dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk, keterlibatan beberapa *stakeholder* menjadi kunci utama dalam percepatan dan optimalisasi pengembangan Desa Wisata Kupuk.

Sehingga dalam artikel ilmiah ini penulis ingin menganalisis mengenai strategi (*community building*) yang diterapkan Pemerintah Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Desa Wisata

Kupuk. Sehingga hasil dari artikel ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam optimalisasi pengembangan Desa Wisata Kupuk serta mampu memberikan kontribusi dalam percepatan kemajuan perekonomian Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna (data yang sebenarnya, serta data yang pasti yang mengandung nilai dibalik data yang tampak). Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa, maupun kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif cenderung memusatkan perhatian pada masalah aktual pada saat penelitian berlangsung.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik untuk meneliti desa tersebut dikarenakan keragaman budaya yang dimiliki, tingkat partisipasi dan solidaritas masyarakat yang tinggi, serta prestasi Desa Kupuk yang berhasil menjadi Juara I Lomba Desa se-Kabupaten Ponorogo dan juga Juara II Lomba Desa se-Jawa Timur pada 2016 yang lalu.

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga layak untuk dijadikan informan. Pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu dengan pertimbangan karakteristik populasi. Adapun informan dalam penelitian ini Pemerintah Desa Kupuk sebanyak 2 orang, Kelompok Sadar Wisata sebanyak 2 orang, masyarakat Desa Kupuk sebanyak 2 orang, serta 1 orang wisatawan. Adapun sumber data yang digunakan yakni 1) Sumber primer yang di dapatkan secara langsung di lapangan, baik melalui wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan. 2) Sumber sekunder yang merupakan sumber data tidak langsung misalnya dokumen, *website*, dll. Dokumen tersebut dapat meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, media informasi, dan sumber referensi kepastakaan lainnya.

Sedangkan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan *triangulasi* diantaranya yakni :

1) Observasi yang merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai kondisi sesungguhnya di lapangan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, membantu mengerti perilaku

manusia, dan melakukan evaluasi. Sehingga, observasi penting dilakukan guna mengetahui kondisi mengenai pembangunan Desa Wisata Kupuk, kondisi sosial dan budaya masyarakat, tradisi yang ada, keadaan masyarakat sekitar, serta kondisi kelompok/komunitas lokal seperti misalnya (POKDARWIS).

2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan berhadapan secara langsung (*face to face*) dengan informan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur yang termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dalam pelaksanaannya peneliti lebih bebas bertanya dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data deskriptif mengenai kebijakan dan strategi Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Wisata Kupuk, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan Desa Wisata Kupuk.

3) Dokumentasi yakni proses pencatatan segala peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, audio (rekaman), maupun karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi sangat penting dalam

penelitian, diantara dokumentasi dalam penelitian ini seperti ; surat-menyurat, catatan harian, rekaman hasil wawancara, foto-foto, laporan, dll.

Penulis melakukan analisis data melalui mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta mengaitkannya dengan teori yang ada untuk dijabarkan kembali dan menyusun sintesa serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami. Penulis melakukan proses analisis data selama penelitian di lapangan. Proses analisis data berlangsungnya secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga dapat dicapai data pada titik jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dengan menerapkan uji kredibilitas. Penulis menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, serta triangulasi untuk menguji kredibilitas data. Untuk mengetahui apakah peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan, hal ini dapat dilihat dari surat perpanjangan pengamatan atau penelitian. Sebelumnya peneliti juga telah melakukan pengamatan di lokasi yang sama dalam Tugas

Praktikum tentang “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Kupuk”, sehingga peneliti telah memiliki data-data hasil pengamatan. Dan untuk skripsi nanti peneliti akan melakukan pengamatan ulang dan menganalisis hasilnya.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sehingga urutan peristiwa dapat terekam secara sistematis. Selain itu untuk meningkatkan ketekunan dapat dilakukan dengan memperbanyak membaca referensi-referensi hasil penelitian, dokumentasi, maupun buku-buku dan jurnal-jurnal.

DISKUSI DAN HASIL

Strategi awal Pemerintah Desa Kupuk dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk yakni dengan melakukan penggalian dan pemetaan potensi wisata bersama ASIDEWI Jawa Timur dan juga mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Diantara potensi yang sangat mendukung dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk, diantaranya :

1. Potensi Alam

- a. Sendang Tunggul Wulung (Sendang Beji)
- b. Lahan persawahan yang indah

2. Potensi Sosial Budaya

Ada 9 kelompok seni tradisi yang *ngrembaka* (berkembang) di Desa Kupuk, diantaranya adalah:

- a. Seni Reyog Ki Ageng Tunggu Wulung
- b. Seni Reyog Mini Putro Singo Looko Joyo
- c. Seni Karawitan Mahabharata
- d. Seni Karawitan Anak Sekar Tandak
- e. Seni Gajah Ki Punjul
- f. Seno Gajah Kyai Sentono
- g. Seni Gajah Nyi Bendinatun
- h. Seni Unta Al Hidayah

3. Potensi Industri dan Kerajinan

- a. Sentra Industri Kecil Genteng
- b. Pengrajin Ukir
- c. Sentra Penyamaan Kulit
- d. Sentra Pembuatan Wayang Kulit
- e. Sentra Anyaman Bambu.

4. Potensi Kuliner

- a. Soto Sor Asem (Soto Kupuk)
- b. Nasi Pecel Ponorogo

5. Potensi Kreasi Seni Budaya

Grebeg Selo

6. Potensi Sarana dan Prasarana

Penunjang

- a. Taman Desa
- b. 30 *Homestay*
- c. Wahana *Outbond* (*flying fox* dan *outbond*).

7. Potensi Lembaga Kemasyarakatan Desa

- a. Kelompok Sadar Wisata

- b. Karang Taruna
- c. Kelompok Tani

8. Potensi Karakteristik Masyarakat

Masyarakat Desa Kupuk memiliki semangat gotong royong yang tinggi, solidaritas yang kuat, dan sangat ramah terhadap orang luar. Masyarakat Desa Kupuk juga menjunjung tinggi nilai-nilai religius serta budaya yang dimiliki masyarakat. Ini sangat berpotensi untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa dan pengembangan desa wisata di Desa Kupuk.

Selanjutnya Pemerintah Desa membentuk Kelompok Sadar Wisata Desa Kupuk yang bernama POKDARWIS “Menjemput Impian” dengan Surat Keputusan Pemerintah Desa dan juga akte Notaris.

Untuk mempersiapkan SDM yang ada, Pemerintah Desa mengirimkan anggota POKDARWIS untuk mengikuti Sertifikasi Guide Ekowisata di Blitar dan di Trawas, Mojokerto. Selain itu juga Mengirimkan anggota POKDARWIS untuk mengikuti *study banding* di Blitar dalam acara *Lounging* Kampung Melon. Disamping itu Pemerintah Desa juga mencari *link* donatur atau bantuan-bantuan dari pihak lain, seperti diantaranya Desa Kupuk mendapatkan 10.000 ikan koi dari Petani Blitar.

Pemerintah Desa Kupuk juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan *home industri*, seperti : Pelatihan Pembuatan Bakso, Nugget, dan Sosis. Tidak hanya itu, masyarakat juga mendapatkan bantuan dari Kemendes yang berupa Alat Besar untuk pembuatan sosis.

Pemerintah Desa bersama Kelompok Sadar Wisata serta masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan besar dalam rangka strategi promosi Desa Kupuk, seperti : Lomba Mewarnai dan Outbond antar TK dan SD, Konser Dangdut dengan mendatangkan artis terkenal, dan juga Konser Kreasi Budaya Adalam rangka penggalian dana untuk korban bencana tanah longsor Banaran.

Untuk menunjang proses pengembangan dan pembangunan Desa Wisata Kupuk Pemerintah Desa Kupuk mengalokasikan sebagian ADD Tahun Anggaran 2017 ini untuk pembangunan infrastruktur pengembangan Desa Wisata, seperti : Pavingisasi lokasi, maupun pengadaan Toilet.

Desa Kupuk juga berhasil menjadi Juara I dalam lomba Desa se-Kabupaten Ponorogo. Selain itu Desa Kupuk juga berhasil menjadi Juara II dalam Lomba Desa se-Propinsi Jawa Timur. Tentunya hal tersebut dapat digunakan sebagai motivasi tersendiri bagi Desa Kupuk

untuk melakukan pengembangan Desa Wisata di Desa Kupuk.

Inovasi sangat diperlukan sebagai daya tarik wisatawan terhadap suatu objek wisata. Pemerintah Desa Kupuk melakukan inovasi dari kegiatan bersih desa yang rutin diselenggarakan tiap tahunnya oleh Desa Kupuk, dengan mengubahnya menjadi “*Grebeg Selo*”. *Grebeg* sendiri dapat di artikan sebagai acara budaya yang rutin digelar setiap tahunnya untuk memperingati sesuatu hal, dalam hal ini bersih desa dari Desa Kupuk. Sedangkan *Selo* adalah salah satu nama bulan dalam kalender Jawa, lebih tepatnya Bulan *Selo* setelah bulan Bodho (Hari Raya Idul Fitri).

Acara *Grebeg Selo* diilhami dari Acara *Grebeg Suro* yang menjadi agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Menurut Harsono dan Santoso (2016:106) *Grebeg Suro* yang marak sejak 1970-an itu memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Ponorogo, masyarakat sangat antusias dalam menyambut kehadiran bulan ini, bahkan yang dari luar kota pun banyak yang pulang ke Ponorogo untuk turut menikmati acara ini. Tradisi tersebut dimulai dari diselenggarakannya malam tirakatan, Kirab Pusaka dan Jamasan Pusaka Bathoro Katong, Kirab Pusaka dan Jamasan Bantar Angin, Larung Sesaji di Telaga Ngebel yang sekarang menjadi Larung Risalah Do’a, Istighosah di

Pendopo bahkan sampai Festival Nasional Reyog Ponorogo.

Sedangkan tradisi *Grebeg Selo* yang menjadi ciri khas Desa Kupuk dimulai sejak Kepemimpinan Pemerintah Desa saat itu yakni dimulai tahun 2013. Acara tersebut diselenggarakan selama 4-7 hari dengan serangkaian acara seperti : Istighosah Akbar; Pawai Karnaval Kupuk dan Kirab Budaya keliling Desa Kupuk; Parade Budaya dan Kesenian, dalam acara tersebut 9 Kreasi Seni Budaya yang dimiliki Desa Kupuk ditampilkan untuk memeriahkan acara tersebut, banyak sekali pengunjung yang datang bahkan ribuan orang, baik dari masyarakat sekitar Ponorogo maupun luar Ponorogo; kemudian juga ada *Night Festival* Seni Jaranan Tek Turonggo Wulung; dan puncak acara diadakan Seni Wayang Kulit bersama dalang-dalang terkenal.

Agenda besar tersebut tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk *Grebeg Suro* sendiri berdasarkan penelitian Harsono dan Slamet (2016: 107) didanai melalui dana APBD sampai miliaran rupiah. Tentunya tidak berbeda jauh dengan biaya yang dikeluarkan oleh Desa Kupuk dan agenda tersebut hanya didanai menggunakan swadaya dari masyarakat Desa Kupuk. Pengeluaran yang besar, tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan masyarakat, karena masyarakat cenderung sebagai aktor

dalam perayaan tersebut. Momentum tersebut akhirnya justru menguntungkan masyarakat diluar Desa Kupuk yang berjualan di sekitar lokasi. Sehingga diperlukan adanya pengelolaan yang tepat dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Kupuk, agar acara yang besar dengan pengeluaran yang besar tersebut, mampu memberikan *income* yang besar pula bagi Pemerintah Desa dan masyarakat sekitar.

Community Development atau Pengembangan Komunitas bisa juga diterjemahkan sebagai strategi pengembangan masyarakat, yakni suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. (Soetomo, 2006:79)

Berdasarkan analisis penulis Pemerintah Desa Kupuk menggunakan strategi *community building* dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk. Ini dapat dilihat dari masyarakat Desa Kupuk yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata Kupuk saling bergotong royong untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, maupun kultural yang dimiliki melalui dalam mewujudkan wisata

Kupuk. Sedangkan Pemerintah Desa mengimplementasikan otoritas yang dimiliki untuk mengintegrasikan komunitas (POKDARWIS) ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi yang lebih optimal komunitas (POKDARWIS) bagi kemajuan nasional.

Namun, strategi *Community Development* yang diterapkan Pemerintah pun juga belum maksimal, otoritas Pemerintah Desa Kupuk selain memberikan kewenangan pengembangan kepada komunitas (POKDARWIS), juga dibutuhkan pengintegrasian komunitas ke dalam kehidupan nasional sehingga dapat lebih optimal dalam mencapai kemajuan nasional. Untuk mengintegrasikannya ke kehidupan nasional dibutuhkan kerjasama beberapa *stakeholder* terkait, salah satunya yakni *private sektor*. Sehingga selain modal partisipasi masyarakat dan peran Pemerintah Desa juga dibutuhkan pihak lain untuk mencapai pengembangan yang optimal.

Community Development yang merupakan salah satu strategi dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat juga sebagai suatu gerakan, *community development* tidak bersifat netral, melainkan berusaha melakukan reformasi terhadap kondisi yang kurang menguntungkan (Soetomo, 2006:96). Sehingga strategi ini pun tentunya masih membutuhkan adanya reformasi dan

perubahan demi mewujudkan strategi dan langkah yang tepat dalam pengembangan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa POKDARWIS juga menerapkan sistem saham dalam pengembangan Desa Wisata. Saham-saham tersebut diperoleh hanya dari swadaya masyarakat, mereka tidak membuka saham bagi pihak luar selain internal Desa Kupuk Sendiri. Dalam pengelolaannya terdapat komisariat saham yang mengelola saham tersebut dan mendokumentasikan siapa saja pemilik saham-saham tersebut juga ada. Saham untuk pengadaan *flying fox*, dengan harga saham per lembar @Rp 100.000,- dapat terkumpul dana sekitar Rp 20 juta rupiah. Selain itu seksi kewirausahaan juga membuka saham untuk pengadaan Kedai Kupuk, dengan terkumpul dana sekitar Rp 30 juta rupiah. Keseluruhan dana tersebut murni dari swadaya masyarakat Desa Kupuk. Mereka menanamkan saham dengan bermodalkan kepercayaan, dan optimisme untuk membangun Desa Wisata Kupuk. Mereka sengaja tidak menarik investor dari luar, karena menginginkan pembangunan yang murni dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Namun, jika penulis cermati saham yang terkumpul dengan jumlah masyarakat yang terlibat kurang berimbang. Mengapa demikian ? jika per saham dengan harga Rp 100.000,- dengan

melibatkan banyak orang dengan hasil yang di dapatkan hanya satu atau dua wahana outbond, tentunya akan memakan waktu yang lama untuk mengembalikan modal kepada pada pemilik saham, belum lagi kondisi pembangunan yang belum maksimal juga menjadi kendala karena jika demikian maka pengunjung yang datang di Desa Wisata Kupuk masih sangat terbatas. Dan kebanyakan pengunjung datang ketika hari libur saja atau akhir pekan. penarikan tiket juga belum digalakkan karena pengelola menilai bahwa Desa Kupuk masih belum sepenuhnya siap. Sehingga jika demikian *incame* yang didapatkan POKDARWIS akan sangat terbatas.

Keberadaan Kepala Desa Kupuk sebenarnya memberikan peluang besar bagi Pemerintah Desa Kupuk untuk memperluas jaringan, dan menambah *sponsorship* maupun investor dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk. Namun, sangat disayangkan jika Pembangunan Desa Wisata Kupuk tidak membuka peluang pihak swasta untuk turut serta dalam pembangunan. Karena pengembangan Desa Wisata Kupuk tidak akan tercapai dengan cepat jika hanya mengandalkan swadaya masyarakat.

Sebenarnya, keterlibatan *private sector* dalam pembangunan juga perlu diperhatikan. Dalam konsep *good governance* paling dasar, ada tiga

stakeholder yang menjadi komponen utama dalam pembangunan, diantaranya yakni pemerintah (*state*), sektor swasta (*public sector*), dan masyarakat (*society*). Mereka saling berinteraksi dan menjalankan fungsi serta perannya masing-masing, pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, serta masyarakat sebagai pembangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak maupun menggerakkan kelompok - kelompok masyarakat untuk berpartisipasi (Sumarto, 2009:25).

Pembangunan Desa Wisata Kupuk hanya menggunakan swadaya masyarakat serta anggaran dana dari Pemerintah, walaupun demikian mereka juga menerima bantuan donatur (*non profit motif*). Pemerintah Desa maupun POKDARWIS tidak ingin menarik investor dari luar, berdasarkan penelitian penulis ada banyak tawaran untuk pengembangan Sendang Beji, seperti ; pengadaan Kolam Renang, Taman bermain, dll. Namun Pemerintah Desa menolak, karena mereka menginginkan pembangunan dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Jika demikian, maka percepatan pembangunan akan sulit dicapai. Jika hanya mengandalkan swadaya masyarakat, tentunya modal

pembangunan juga akan sangat minim. Begitupula dengan ADD pun juga terbatas. Fasilitas umum yang ada di lokasi wisata juga belum terpenuhi, seperti toilet. Begitupula dengan fasilitas – fasilitas pariwisata yang tersedia, seperti wahana bermain anak, tempat santai, sarana transportasi keliling desa juga belum begitu maksimal. Aksesibilitas jalan dengan kondisi jalan desa yang sedang, dengan kondisi jalan poros desa yang juga masih perlu diperbaiki. Ketika menggandeng pihak swasta akan lebih mudah bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pemerataan pembangunan, dan memaksimalkan potensi yang ada dalam percepatan pembangunan untuk Desa Wisata Kupuk.

Padahal, tujuan utama pengembangan wisata adalah mendatangkan lebih banyak wisatawan pada suatu kawasan wisata sehingga mampu menambah pendapatan lokal dan juga meningkatkan devisa negara. Selain itu juga sebagai salah satu langkah untuk mengenalkan dan memelihara kebudayaan dan keunikan yang dimiliki suatu kawasan wisata tersebut (Gunardi, 2010:32)

Keterlibatan ketiga elemen dalam pencapaian *good governance* menjadi hal yang penting. Masing-masing memiliki peran, tugas dan tanggung jawab. Ketika pihak swasta tidak dilibatkan, maka percepatan pembangunan akan sangat sulit

dicapai. Sehingga, pembangunan akan berjalan pelan, bahkan jika berlangsung lama, kepercayaan masyarakat (*trust*) terhadap Pemerintah Desa yang merupakan salah satu modal dalam pembangunan dapat terkikis serta dapat mengancam keberadaan Pemerintah. Pengembangan Desa Wisata Kupuk dapat saja berhenti kapan saja karena kurangnya dorongan dari masyarakat.

A. KESIMPULAN

Secara umum penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa strategi *Community Development* yang dilakukan Pemerintah Desa Kupuk dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk sudah cukup baik, namun masih perlu adanya evaluasi demi memaksimalkan pengembangan Desa Wisata Kupuk.

Penerapan *community building* Pemerintah Desa Kupuk dapat dilihat dari masyarakat Desa Kupuk yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata Kupuk secara mandiri saling bergotong royong untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, maupun kultural yang dimiliki dalam mewujudkan wisata Kupuk. Sedangkan Pemerintah Desa Kupuk mendukung pengembangan Desa Wisata Kupuk, salah satunya dengan membentuk POKDARWIS yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan pariwisata dan juga sebagai mitra Pemerintah. Keberadaan POKDARWIS juga mendapat

dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, sehingga ketika POKDARWIS menerapkan sistem saham sebagai modal pembangunan *flying fox* maupun Kedai Kupuk antusiasme dan partisipasi masyarakat untuk menanamkan saham juga sangat tinggi. Namun, yang perlu diperhatikan juga dana tersebut diperoleh dari banyak orang dari pemilik saham. Sehingga tentunya akan memakan waktu yang lama untuk mengembalikan modal kepada pada pemilik saham, belum lagi kondisi pembangunan yang belum maksimal juga menjadi kendala, penarikan tiket juga belum digalakkan karena pengelola menilai bahwa Desa Kupuk masih belum sepenuhnya siap. Sehingga jika demikian *income* yang didapatkan POKDARWIS akan sangat terbatas.

Pembangunan Desa Wisata Kupuk tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal ini dibutuhkan adanya sinergitas yang menarik antar dukuh, potensi yang dimiliki disetiap dukuh harus dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan, karena Desa Wisata harus mampu mengintegrasikan daya tarik wisata dengan struktur kehidupan masyarakat yang ada. Selain itu juga dibutuhkan kerjasama antar berbagai pihak pada tingkat nasional, sehingga tidak hanya mengandalkan swadaya pada masyarakat internal Desa Kupuk, karena komunitas

yang kecil membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk melakukan pengembangan, seperti halnya manusia, mereka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitupula dengan POKDARWIS, jika hanya fokus pada kelompok, maka akan sulit untuk mencapai pembangunan yang progresif. Adapun penyamaan tujuan bersama menjadi kunci pengembangan Desa Wisata Kupuk, selain itu penyamaan persepsi, tujuan, visi dan misi juga harus diperhatikan, agar tidak menimbulkan berbagai macam kepentingan, sehingga dapat menimbulkan konflik atau bahkan perpecahan. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, maka dibutuhkan tindakan-tindakan tidak hanya pada tingkat lokal, namun regional ataupun nasional.

Dalam konsep *good governance* paling dasar, ada tiga elemen penting yang menjadi komponen utama dalam pembangunan, yakni pemerintah, masyarakat dan juga pihak swasta. Mereka berinteraksi sesuai fungsinya masing-masing. Pemerintah sebagai stabilisator dalam lingkungan politik dan hukum, sedangkan swasta sebagai pencipta lapangan kerja dan pendapatan sedangkan masyarakat sebagai pembangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk penggerak kelompok-kelompok masyarakat untuk berinteraksi.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Kupuk tidak menerima investor dari luar (pihak swasta), jika demikian maka dapat kita ketahui bahwa salah satu komponen utama dalam pembangunan tidak dilibatkan yakni sektor swasta, padahal sektor swasta memiliki peranan yang penting dalam pembangunan. Percepatan pembangunan akan sulit dicapai jika tidak melibatkan sektor swasta.

Demikian pula dengan keterbatasan pendanaan akan sulit diatasi jika hanya mengandalkan swadaya masyarakat. Sehingga untuk itu, diperlukannya kerjasama antar *stakeholder* baik itu pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta sehingga tujuan utama pembangunan dapat dicapai secara maksimal. Namun, perlu kiranya tetap ada ketentuan-ketentuan yang diatur Pemerintah sejauh mana keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan sehingga stabilitas politik, ekonomi, maupun sosial dapat tercapai dan percepatan pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Gunardi, Gugun. 2010. *Identifikasi Potensi Kawasan Wisata Kali Pasir, Kota Tangerang*, dalam Jurnal PLANESA, Vol. 01, No. 1, hlm. 32

- Harsono, Jusuf dan Santoso, Slamet. 2016. *Sosiologi Masyarakat Ponorogo*. Ponorogo : UMP Press dalam www.eprints.umpo.ac.id/2874/ yang diakses tanggal 22 Juli 2017 pukul 20.40 WIB.
- Kusworo, Hendrie Adjie dan Damanik, Janianton. 2002. *Pengembangan SDM Pariwisata Daerah; Agenda Kebijakan untuk Pembuat Kebijakan*, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 06, No. 1, hlm. 105-106.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sumarto, Hetifah.Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance "20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia"*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.